
Pendidikan dan Kekuasaan: Antara Pembebasan dan Dominasi Perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire

Najwah Addina^{1)*}, Muh. Hanif²⁾

^{1,2)} Manajemen Pendidikan Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email : najwahaddina04@gmail.com
muh.hanif@uinsaizu.ac.id

Abstract

The complex relationship between education and power is a hot topic of discussion in many countries. Education not only acts as a means of liberation and makes individuals empowered, but also becomes a tool of domination of existing power in society. This research aims to analyze the role of education to maintain and challenge power, and explore the potential of education as a tool of liberation in the social context. The research uses a literature review through analysis of educational theories and figures through several literature sources. The research produced findings that indicate that education has a dual role as a tool for reproducing power and domination through the implementation of educational policies and becoming a liberation space that encourages awareness and social change through critical education. Therefore, there is a need for inclusiveness of the education system, democratization, and creating qualified students to become agents of change.

Keywords: Power and Knowledge, Reproduction of Social Inequality, Critical Education

Abstrak

Hubungan kompleks antara pendidikan dan kekuasaan menjadi perbincangan hangat di berbagai negara. Pendidikan tidak sekadar berperan sebagai sarana pembebasan dan menjadikan individu berdaya, namun juga menjadi alat dominasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis peran pendidikan untuk mempertahankan maupun menantang kekuasaan, serta menggali potensi pendidikan sebagai alat pembebasan dalam konteks sosial. Penelitian menggunakan kajian pustaka melalui analisis teori dan tokoh-tokoh pendidikan melalui beberapa sumber literatur. Penelitian menghasilkan temuan yang mengindikasikan bahwa pendidikan memiliki peran ganda sebagai alat reproduksi kekuasaan dan dominasi melalui penerapan kebijakan pendidikan serta menjadi ruang pembebasan yang mendorong kesadaran dan perubahan sosial melalui pendidikan kritis. Oleh karena itu, diperlukan adanya inklusifitas sistem pendidikan, demokratisasi, dan menciptakan peserta didik yang berkualitas dalam menjadi agent of change.

Kata kunci: Kekuasaan dan Pengetahuan, Reproduksi Kesenjangan Sosial, Pendidikan Kritis

PENDAHULUAN

Kualitas sumber daya manusia pada suatu negara ditentukan oleh sistem pendidikan. Namun, pendidikan tidak berjalan sendiri tanpa dipengaruhi oleh politik dan kekuasaan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, struktur kekuasaan dalam masyarakat berkelindan erat dengan pendidikan. Perdebatan relasi pendidikan dan kekuasaan menjadi permasalahan yang tidak pernah terselesaikan. Pendidikan dijadikan sebagai alat untuk menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai, norma, dan ideologi tertentu. Sebagai contoh akses pendidikan berkualitas di sekolah menjadi cerminan kepentingan kelas dominan, sehingga memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial masyarakat. Di sisi lain, pendidikan juga memiliki fungsi sebagai alat pembebasan yang mendorong individu berpikir kritis, berpartisipasi secara sosial, bahkan menantang ketidakadilan penguasa. Pendidikan dijadikan sarana mobilitas dalam stratifikasi sosial. Setidaknya terdapat dua dimensi dalam stratifikasi sosial yang terdiri dari dimensi vertikal serta dimensi horizontal. Dimensi vertikal antara pemerintah dan rakyat dalam stratifikasi sosial, berupa kelas sosial, kekuasaan, atau status sosial menunjukkan adanya hierarki dalam masyarakat. Sedangkan dimensi horizontal terdiri dari perbedaan sosial yang setara,

<https://iipipi.org/index.php/iipipi>

seperti suku, agama, mata pencaharian, dan budaya tanpa memandang sistem kasta (Wibowo et al., 2025).

Keterkaitan antara politik dan pendidikan menunjukkan bahwa politik menjadi penentu arah perkembangan dan kebijakan pendidikan di suatu negara (Purwanto, 2022). Michel Foucault menyoroti pendidikan bukan hanya transfer ilmu, melainkan sebagai proses penanaman ideologi dan memperkuat kekuasaan. Instansi pendidikan menjadi lokus untuk memproduksi pengetahuan dan kontrol sosial (Siswadi, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, Pierre Bourdieu melalui konsep teori modal memaparkan bagaimana pendidikan dapat dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan dan status sosial (Agus Siswadi, 2024b). Ketimpangan akses pendidikan berkualitas antara kelompok marjinal dan kelas dominasi menjadi bukti bahwa faktor kekuasaan berpengaruh dalam memperoleh pendidikan. Berbeda dengan Foucault dan Bourdieu, Paulo Freire menjelaskan bahwa pendidikan justru sebagai alat pembebasan individu dari penindasan. Pendidikan harus dapat memberdayakan siswa agar memiliki pemikiran kritis dan berkontribusi dalam perubahan (Lestari et al., 2023).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan relasi antara pendidikan serta kekuasaan berdasarkan peranannya sebagai sarana pembebasan atau justru sebagai alat dominasi. Menjelaskan bagaimana pendidikan dapat menentukan siapa yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat dan bagaimana kekuasaan mempengaruhi pendidikan. Penelitian mengidentifikasi bentuk-bentuk hegemoni dan dominasi dalam pendidikan, meliputi cara kekuasaan menanamkan ideologi melalui pendidikan. Melihat kondisi pendidikan Indonesia pada saat ini, maka diperlukan adanya pemahaman mendalam mengenai kebijakan pendidikan Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor kekuasaan dan politik, serta bagaimana pengaruh tersebut menentukan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Penelitian yang dilakukan harapannya dapat menggali solusi yang memungkinkan adanya pengurangan pengaruh politik dalam sistem pendidikan, sehingga sistem pendidikan Indonesia dapat berkembang lebih maju (Wilda, 2024).

Pendidikan menjadi alat untuk mempertahankan status quo dan juga penanaman ideologi dominan. Michel Foucault menilai pendidikan sebagai bagian dari rantai kekuasaan yang secara tidak langsung mengendalikan tubuh dan pikiran masyarakat yang belajar. Pendidikan terpusat pada kepatuhan dan penetapan standar yang melanggengkan kekuasaan dominan dengan mencetak individu yang patuh. Pendapat Foucault diperkuat oleh Bourdieu dalam teori modal. Pierre Bourdieu menjelaskan bagaimana faktor ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi aspek pendidikan. Maka dari itu, untuk menghilangkan belenggu penindasan dalam pendidikan, Paulo Freire mencanangkan konsep pendidikan kritis agar dapat dijadikan sarana untuk mencapai kesetaraan sosial dan pembebasan individu dari kebodohan, kemiskinan, dan ketimpangan. Freire menekankan fungsi pendidikan sebagai pendorong kesadaran kritis (*conscientization*). Pendidikan kritis dan humanistik memberi wadah bagi individu untuk dapat mengambil kembali otonomi dari sistem kekuasaan yang menindas.

Pemikiran Filsafat Michel Foucault

Michel Foucault (1926-1984) menjadi salah satu cendekiawan Prancis sekaligus kritikus pengetahuan dan sosial. Foucault terkenal dengan gagasannya mengenai hubungan erat antara kekuasaan dan pengetahuan. Dalam karya berjudul "Power/Knowledge", ia menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja sebagai suatu sistem yang menghasilkan dasar pemikiran hukum dan pengetahuan, yang kemudian digunakan untuk melaksanakan kekuasaan secara lebih luas. Pengetahuan dan kekuasaan saling berhubungan erat dan saling memengaruhi satu sama lain (Pratama, 2021). Kekuasaan dapat menjadi dasar pembenaran bagi hukum dan informasi, juga sebaliknya, pengetahuan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan. Konsep kekuasaan menurut Foucault berbeda dari pemahaman umum selama ini. Kekuasaan sering diartikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar bertindak dan berpikir sesuai dengan keinginan pihak yang berkuasa, seringkali dengan paksaan dan bahkan kekerasan. Namun,

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

Foucault menawarkan perspektif yang berbeda, melihat kekuasaan sebagai hubungan yang rasional, positif, produktif, dan diskursif.

Kekuasaan berperan dalam menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah atau valid. Dengan kata lain, susunan kekuasaan dalam masyarakat atau organisasi memengaruhi jenis pengetahuan yang diutamakan, diterima, atau diabaikan. Sebagai contoh, pemahaman mengenai kesehatan dan penyakit dalam bidang medis sangat dipengaruhi oleh pengaruh komunitas medis dan ilmiah. Hal ini dapat dilihat melalui catatan sejarah mengenai cara penyakit tertentu dikategorikan dan diobati. Sebaliknya, pengetahuan juga berperan dalam memengaruhi kekuasaan. Informasi yang dihasilkan, disebarkan, dan diterima sebagai kebenaran oleh suatu komunitas dapat dimanfaatkan untuk membenarkan atau memperkuat praktik kekuasaan tertentu (Agus Siswadi, 2024).

Pemerintah mempunyai peran dominan untuk membentuk kebijakan pendidikan. Hal ini mencakup kurikulum, standar pengajaran, serta sistem evaluasi. Kekuasaan memunculkan suatu kerangka yang menentukan bagaimana arah pendidikan diselenggarakan dan capaian pendidikan. Jaringan politik memiliki peran penting dalam menentukan pendidikan, baik melalui materi pelajaran maupun dalam menentukan ideologi yang dibentuk melalui pendidikan (Humaira et al., 2024). Contohnya pemberian penekanan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan upaya pemerintah dalam menanamkan nasionalisme sejak dini. Menurut Michel Foucault, dunia pendidikan merupakan suatu institusi sosial yang memegang peranan penting dalam mengokohkan dominasi kekuasaan. Foucault berpendapat bahwa pendidikan bukan sekadar ruang netral untuk transfer pengetahuan, melainkan arena strategis tempat kekuasaan bekerja secara tersembunyi namun sistematis dalam membentuk pribadi serta menata masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kekuasaan di era modern tidak lagi bersifat represif dan vertikal yang dilakukan secara terang-terangan, tetapi berjalan melalui mekanisme pendisiplinan, pengawasan, dan normalisasi yang sangat terlihat dalam aktivitas pendidikan.

Pandangan Foucault tentang bagaimana tubuh didisiplinkan memperlihatkan bahwa belajar bukanlah semata-mata hasil dari kemauan yang dipaksakan dari luar. Meskipun keinginan setiap orang bisa berbeda, disiplin sebenarnya adalah perwujudan dari kemauan diri yang sesungguhnya. Ingatlah, disiplin berbeda dari sekadar patuh seperti seorang budak, sebab disiplin itu tidak berasal dari penyerahan diri atau ketaatan membabi buta. Disiplin muncul karena tubuh bukanlah fokus utama dalam hubungan tersebut. Lebih tepatnya, disiplin berhubungan erat dengan kemampuan seseorang untuk meningkatkan kendali atas tubuhnya sendiri. Di antara berbagai cara belajar, yang paling penting adalah memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengendalikan tubuh sendiri. Dengan begitu, individu menyadari bahwa ada beberapa hal di luar dirinya yang tidak seperti pemikirannya dan perbedaan itu adalah bagian dari ketentuan yang lebih besar. Menghargai perbedaan ini adalah kunci utama (Almas, 2024).

Hingga saat ini, kondisi politik dalam bidang pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mandiri. Hal ini terlihat dari minimnya dedikasi pemerintah dalam menyediakan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang tanpa biaya, di mana alokasi anggaran 20% dari APBN belum terpenuhi (Sarnoto, 2022). Di samping itu, penghargaan terhadap profesionalitas dan kesejahteraan tenaga pengajar belum menjadi fokus utama, yang berpengaruh pada penurunan kualitas pendidikan dan daya saing, serta upaya otonomi pendidikan yang masih kurang maksimal. Pada kondisi serupa, kesenjangan dalam pendidikan masih terjadi, walaupun pemerintah telah mengeluarkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), masih terdapat sekolah yang menarik iuran. Sehingga masyarakat ekonomi bawah sulit mendapatkan sekolah tanpa biaya. Kesenjangan tersebut semakin terlihat pada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Teori Modal Pierre Bourdieu

Pierre Felix Bourdieu, yang dilahirkan pada 1 Agustus 1930, di desa kecil Denguin, Pyrenees. Atlantiques, Prancis, adalah seorang sosiolog dari Prancis yang melakukan penelitian mengenai teori sosial dan antropologi budaya. Bourdieu merupakan anak kedua dari pasangan

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

Félix Bourdieu dan Noémie Duhau menghabiskan hidup mereka sebagai petani. Latar belakang sebagai petani membuat Bourdieu memahami dengan baik kondisi kehidupan di desa pada waktu itu. Pierre Bourdieu mengembangkan teori tentang modal yang terdiri dari empat kategori yang masing-masing memiliki peranan krusial dalam membentuk struktur sosial dan ketidakadilan yang berwujud kekayaan ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Pertama-tama, modal ekonomi mencakup kekayaan finansial serta benda-benda fisik yang dimiliki seseorang. Modal ekonomi memberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan yang baik, layanan kesehatan, serta berbagai jenis modal budaya dan sosial. Perbedaan dalam aspek ekonomi menjadi faktor utama dalam menciptakan kesenjangan sosial secara keseluruhan (Agus Siswadi, 2024b).

Bourdieu menjelaskan bahwa terdapat kaitan erat antara sekolah, yang dilihat sebagai wadah pelestarian budaya dominan, dan kelompok sosial yang memiliki daya serap tinggi terhadap penyampaian materi ajar. Keberhasilan siswa dari golongan berada dalam memahami pelajaran di sekolah tak terlepas dari tradisi yang ditanamkan sejak dini di keluarga, membuat mereka akrab dengan dunia pendidikan dan melanggengkan posisi mereka (Allolayuk, 2021). Sebaliknya, siswa dari golongan ekonomi lemah cenderung kesulitan mencerna materi pelajaran. Perbedaan ini memicu persaingan antara kedua kelompok. Sistem pelestarian budaya di sekolah formal tak hanya terkait dengan modal budaya, namun juga modal ekonomi.

Kedua, modal budaya merupakan sekumpulan keterampilan atau kemampuan individu, yang mencakup wawasan, keahlian, cara berkomunikasi, dan hal-hal lainnya, yang berfungsi dalam menentukan serta menguatkan posisi sosial. Modal budaya bisa muncul dalam sikap fisik dan mental yang dihargai di suatu lokasi tertentu, bisa juga terlihat dalam benda-benda budaya seperti buku, karya seni, atau barang lainnya yang dapat diwariskan, atau dapat juga berupa sistem, seperti keterlibatan dan pengakuan dari lembaga pendidikan. *Ketiga*, modal sosial yaitu jaringan sosial yang dimiliki seseorang juga mempengaruhi posisi sosialnya. Semakin banyak teman yang dimiliki dan semakin besar kesamaan dalam pemikiran, maka kekayaan modal sosial yang dimiliki pun akan semakin bertambah.

Menurut Bourdieu, modal sosial merupakan aset dari individu yang berada dalam posisi tertentu dan berperan sebagai sarana untuk menjaga dominasi mereka. *Keempat*, modal simbolik, modal ini sangat berkaitan dengan kekuasaan simbolik, yaitu kekuatan yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh nilai serupa dengan yang didapatkan melalui kekuatan fisik dan ekonomi berkat mobilisasi tertentu. Modal simbolik dapat berupa ruang kerja besar di area tertentu, kendaraan yang dilengkapi dengan supir, namun juga dapat muncul dalam bentuk gelar akademik yang tercantum pada kartu nama serta cara untuk menegaskan otoritasnya (Faisal, 2021).

Pendidikan Kritis Paulo Freire

Paulo Freire, seorang pemikir dalam bidang pendidikan multikultural, dilahirkan pada 15 September 1921 di Recife, Brasil, yang merupakan lokasi dari salah satu kawasan termiskin dan terbelakang di negara berkembang. Freire merupakan anak dari Edeltrus Neves Freire, ibunya, dan ayahnya Joaquim Thomis Tocles Freire, yang bekerja sebagai polisi. Pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya mengedepankan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan komunikasi yang dialogis. Dengan cara mendidik tersebut, Freire senantiasa dapat menghargai dan menghormati setiap percakapan serta pandangan orang lain. Paulo Freire adalah salah satu pemikir yang aktif pada masanya (Lestari et al., 2023). Dengan semangat yang tinggi untuk melawan kemiskinan, Freire mengemukakan gagasan tentang program pemberantasan buta huruf meskipun saat itu terjadi kerusuhan akibat pemerintah yang berkuasa, dan gagasannya dianggap sangat mengancam. Freire memulai kariernya dengan berfokus pada masalah dan pengalaman yang dihadapinya. Dia telah menciptakan berbagai karya terkait pendidikan yang terhubung dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Karya sosial pertamanya berfokus pada penghapusan buta huruf.

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

Paulo Freire menjelaskan bagaimana kenyataan yang dialami dalam sistem pendidikan kaum tertindas, yaitu dengan hilangnya konsep dialog dalam belajar, mengajar, dan dalam arena politik seperti yang diungkapkan dalam *Pedagogy Of The Oppressed*. Penindasan dalam pendidikan sebenarnya tidak hanya berlangsung secara fisik dan tampak, tetapi juga melalui cara-cara yang tidak terlihat. Misalnya, melibatkan struktur ideologis yang disusupkan ke dalam program-program yang secara jelas mengarahkan setiap orang untuk tetap berada dalam kondisi tertindas. Situasi pendidikan saat ini menyebabkan siswa kehilangan kemampuan berpikir kritis terhadap lingkungan mereka, sehingga mereka justru terdorong untuk beradaptasi daripada mengubah keadaan yang ada. Hal ini terjadi karena siswa bukanlah individu yang memiliki kendali atas diri mereka sendiri (Susrajat & Hambali, 2021).

Pendidikan seharusnya membantu siswa secara sadar untuk bertindak sebagai manusia yang menggunakan nalar dan pertimbangan moral. Selain itu, pendidikan juga harus dipahami sebagai upaya menghilangkan penindasan, agar setiap sikap dan tindakan benar-benar memanusiakan manusia (Harjono, 2024). Apabila praktisi pendidikan di Indonesia tetap mengutamakan kepentingan politik dan ekonomi, segala upaya dan kebijakan akan terasa sia-sia. Pendidikan seharusnya dapat mengasah hati nurani siswa dan menumbuhkan sikap tanggung jawab. Dalam dinamika kekuasaan yang membawa perubahan, seorang pemegang kuasa biasanya memiliki harapan agar nilai-nilai mereka diinternalisasi oleh mereka yang dikuasai. Dalam konteks ini, legitimasi menjadi fokus utama dari kekuasaan tersebut. Akibatnya, pelaksanaan kekuasaan sering kali menghasilkan kepatuhan buta dari individu yang dikuasai, seolah-olah mereka hanya menerima mentah-mentah tanpa berpikir kritis. Paulo Freire menyebut fenomena ini sebagai konsep pendidikan "gaya bank." Selanjutnya, perbedaan mendasar antara pendekatan advokasi dan legislatif terletak pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerjemahkan gagasan menjadi tindakan nyata (Hizam & Baharudin, 2022).

Sebagai akibatnya, pendidikan perlu diarahkan untuk meningkatkan kesadaran kritis di antara para siswa, agar mereka mampu memahami dan menganalisis sistem kekuasaan yang ada. Pemikiran kritis juga menekankan betapa pentingnya adanya dialog dan keterlibatan dalam proses pendidikan, di mana siswa tidak sekadar berperan sebagai penerima informasi, namun juga menggerakkan perubahan (Fikri et al., 2024). Freire juga menekankan betapa pentingnya kesadaran kritis, yang merupakan kemampuan seseorang untuk memahami serta menganalisis keadaan sosial dan politik di sekitarnya. Dalam hal ini, para siswa didorong untuk mempertanyakan situasi yang mereka hadapi dan mengenali sumber-sumber penindasan yang ada. Contoh aplikasi teori Freire dapat dilihat dalam berbagai program pendidikan yang ada di seluruh dunia. Misalnya, di beberapa negara di Latin Amerika, ada inisiatif pendidikan yang menggunakan pendekatan Freire untuk memberdayakan komunitas yang terpinggirkan. Program-program ini sering melibatkan pelatihan bagi guru agar dapat mengembangkan metode pengajaran yang bersifat dialogis dan partisipatif, sehingga siswa dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran.

Paulo Freire berpendapat bahwa pendidikan yang membebaskan sangat diperlukan untuk mengakhiri segala bentuk penindasan. Selama pandemi, kegiatan belajar mengajar cenderung didominasi guru, sehingga siswa kurang leluasa mengembangkan potensi diri dan berpikir kritis. Pendidikan humanis, yang menjadikan guru dan siswa sebagai pelaku aktif dalam pembelajaran, bisa menjadi solusi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih membebaskan (Rosyidah & Ridlwan, 2022). Freire menekankan pentingnya interaksi dan kolaborasi dalam dunia pendidikan. Ia tidak setuju dengan sistem pendidikan tradisional yang cenderung kaku dan satu arah, di mana guru hanya berceramah dan murid mendengarkan saja. Sebaliknya, Freire lebih memilih cara yang membuat siswa ikut serta secara langsung dalam belajar, dengan pengalaman dan pendapat mereka dihargai (Al Ayyubi et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan relasi kekuasaan dalam pendidikan sebagai objek, khususnya yang berkaitan erat dengan pembebasan (emansipasi) dan dominasi (kontrol struktural dan ideologis) melalui kajian teoritis dan kajian pustaka. Skala penelitian meliputi skala nasional dan global, terdiri dari teori-teori pendidikan kritis, filsafat sosial dan kekuasaan, serta studi empiris mengenai hubungan pendidikan dan kekuasaan. Hubungan tersebut kemudian dianalisis melalui berbagai pemikiran kritis yang menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja melalui sistem pendidikan. Skala global melalui penggunaan literatur jurnal internasional serta tokoh-tokoh barat. Skala nasional tercermin dari penerapan dan pengaruh ideologi dalam pendidikan.

Data primer merupakan sumber asli yang memuat gagasan utama tokoh-tokoh terkait. Sementara itu, data sekunder merujuk pada literatur pendukung dengan mengembangkan teori-teori dari sumber utama. berasal dari teori atau gagasan asli dari tokoh-tokoh pendidikan dan filsuf sosial seperti Michel Foucault, Pierre Bordieu, serta Paulo Freire yang telah memberikan kontribusi dalam perkembangan dunia Pendidikan. Data sekunder diambil dari sumber literatur artikel ilmiah dan buku yang membahas penerapan teori-teori tersebut dalam konteks pendidikan. Hal ini melibatkan penulis, penggagas, dan institusi yang dijadikan sumber perolehan data.

Instrumen penelitian yang digunakan bersifat dokumentatif karena tidak berinteraksi langsung dengan responden. Lembar telaah literatur dan matriks analisis isi menjadi instrument utama yang digunakan untuk menelusuri, mengklasifikasi, serta menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan. Dengan demikian, instrumen penelitian menjadi sarana penting dalam proses Pembangunan makna dan pengembangan mendalam teori mengenai relasi Pendidikan dan kekuasaan, pembebasan, serta dominasi.

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi identifikasi masalah dan menentukan tujuan penelitian. Kemudian dilakukan penelusuran literatur melalui perpustakaan, google scholar, atau situs lainnya. Sumber literatur tersebut diseleksi untuk menilai relevansi dan kredibilitas, serta dilakukan pengklasifikasian berdasarkan focus penelitian. Setelah itu, melakukan analisis mendalam terhadap sumber literatur yang ada. Langkah terakhir yaitu dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara Menyusun argument konseptual mengenai bagaimana kekuasaan berjalan dalam pendidikan dan berbagai upaya pembebasan yang dapat dilakukan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi pustaka dengan cara mengumpulkan, mencatat, serta mengelompokkan sumber-sumber literatur yang relevan. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggambarkan serta menjelaskan teori, gagasan, dan praktik kekuasaan dalam pendidikan. Keseluruhan sumber tersebut selanjutnya diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. Literatur yang tidak relevan serta diragukan validitasnya akan dieliminasi. Dengan demikian, penulis dapat membangun kerangka intelektual yang kuat, mengidentifikasi, serta menyoroati topik yang paling relevan dan teruji kredibilitasnya.

Melalui pendekatan *library research*, penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan data empiris, melainkan membangun kerangka berpikir kritis dan teoritis mengenai hubungan kekuasaan dalam pendidikan. Penulis berharap, hasil penelitian mampu berkontribusi dalam pemahaman akademik yang membebaskan serta kritis terhadap struktur kekuasaan tersembunyi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dorongan yang memotivasi penelitian lanjutan untuk mengkaji lebih dalam kekuasaan dan pendidikan serta mendorong reformasi kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Peran Kekuasaan dalam Pendidikan

Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk mengarahkan dan mempengaruhi (Musfah, 2022). Kekuasaan dan pendidikan memiliki hubungan yang dinamis dan saling berpengaruh. Kekuasaan dalam konteks etimologi merujuk pada wewenang yang didapat untuk memegang kendali, mengatur, serta mempengaruhi sesuatu (Damanhuri et al., 2024). Persoalan mengenai kekuasaan menjadi daya tarik dalam masyarakat modern, terlebih peranannya dalam pendidikan. Kekuasaan dalam pendidikan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk memberi pengaruh, mengarahkan, dan mengendalikan proses pendidikan. Meliputi penentuan kebijakan, kurikulum, serta melalui hubungan guru dan peserta didik. Louis Althusser mempunyai peranan besar dalam mengetahui keterkaitan kekuasaan yang berpengaruh dalam pendidikan. Althusser berpendapat bahwa ideologi dominan ditanamkan, diperkuat, serta dilestarikan melalui lembaga pendidikan (Backer, 2022). Pendidikan di suatu negara dipengaruhi oleh struktur kekuasaan. Struktur kekuasaan merujuk pada cara dalam mengatur dan membagikan kekuasaan di dalam suatu organisasi, lembaga, atau sistem pendidikan. Konsep ini meliputi beberapa elemen kunci, di antaranya adalah hierarki yang menetapkan tingkat wewenang dan tanggung jawab (Devi et al., 2023).

Kebijakan pendidikan menjadi salah satu alat kekuasaan yang memungkinkan negara atau lembaga mengesahkan kurikulum, sistem asesmen, serta standar pendidikan yang mencerminkan ideologi atau kepentingan tertentu. Kebijakan pendidikan memainkan peran kunci dalam pembentukan struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Selain itu, kebijakan pendidikan juga digunakan sebagai alat kontrol sosial yang dapat menanamkan nilai-nilai kepatuhan yang mendukung stabilitas kekuasaan pemerintah (Wilda, 2024). Tidak hanya melalui kebijakan, kekuasaan juga dapat dijalankan melalui bahasa, seperti contohnya ketika Mendikbudristek menjalankan kekuasaan dengan berpidato yang di dalamnya terdapat diksi persuasif untuk memberikan intruksi. Kekuasaan dan interaksi sosial memiliki hubungan erat dan saling mempengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan selalu hadir di setiap lini kehidupan tanpa kita sadari (Ilham et al., 2023).

Berbicara dalam konteks pendidikan, kekuasaan diibaratkan sebagai dua mata pisau yang mampu membawa dampak positif maupun negatif tergantung cara menggunakannya. Apabila kekuasaan dijalankan secara otoriter, maka dapat membatasi kreativitas dan daya kritis siswa. Sebaliknya, jika digunakan secara partisipatif, kekuasaan menjadi sarana pembebasan dan pemberdayaan individu. Kekuasaan menjadi bagian yang selalu terkait dengan pendidikan yang direncanakan, dilaksanakan, serta dialami. Pemikiran-pemikiran tokoh sejak akhir abad ke-20 memberikan perspektif krusial mengenai keterkaitan antara pendidikan dan kekuasaan. Salah satu tokoh pemikir dalam hal ini adalah Michel Foucault, Ia memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang produktif dan membatasi. Melalui karyanya *Discipline and Punish*, Foucault menyoroti bagaimana kekuasaan dalam pendidikan muncul dalam bentuk aturan, ruang, waktu, serta diri peserta didik dengan tujuan membentuk individu yang taat. Pengetahuan muncul sebagai akibat adanya relasi kuasa di antara manusia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan tidak ada tanpa pengetahuan, dalam hal ini pendidikan (Pratama, 2021).

Pengaruh kekuasaan dalam sistem pendidikan ditunjukkan melalui pengaruh politik dalam menciptakan nilai dan aspirasi masyarakat, keberadaan politik mempengaruhi anggaran pendidikan, serta pengadaan fasilitas dan gaji guru (Hengki et al., 2023). Dari berbagai sudut pandang ini, terlihat bahwa pendidikan adalah ruang yang penuh dengan relasi kuasa, baik yang bersifat struktural, simbolis, maupun kultural. Kekuasaan tidak hanya muncul melalui lembaga atau individu tertentu, tetapi juga melalui praktik sehari-hari yang dianggap biasa dan netral. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam mengenai relasi kekuasaan dan pendidikan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan merata.

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

Keterkaitan antara pendidikan dan kekuasaan selalu berhubungan erat sehingga kondisi tersebut dapat diketahui bahwa politik negara sangat mempengaruhi arah perkembangan pendidikan di suatu negara (Florentino, 2024). Pendidikan yang diberikan selalu sepihak dengan keinginan pola penguasa yang menetapkan kurikulum. Oleh karena itu, politik memiliki pengaruh erat dalam pendidikan. Berdasarkan kronologis historis, perubahan kurikulum seiring bergantinya penguasa, menandakan bahwa kekuasaan memiliki pengaruh dalam pendidikan. Menurut Muhammad Iqbal, pendidikan seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip individualitas, pertumbuhan individu, kreativitas, pendidikan karakter, dan pendidikan sosial (Rofiq & Muhammad, 2023). Pendidikan bukan hanya laboratorium ideologi yang akan menghilangkan hak siswa untuk berkreaitivitas. Pandangan Muhammad Iqbal mengenai kekuasaan dalam dunia pendidikan lahir dari gagasan mendalamnya tentang keleluasaan batin, pembangunan jati diri (*khudi*), dan arti penting kemandirian seseorang. Menurut Iqbal, pendidikan bukan hanya sekadar media penyampaian ilmu, melainkan juga wahana untuk memerdekakan dan mengembangkan kemampuan diri manusia.

Interaksi antara kekuasaan politik dan pendidikan muncul dalam berbagai cara. Ketergantungan tersebut bervariasi dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Hubungan ini dapat berupa interaksi di dalam kelompok (Tusadia et al., 2023). Keterkaitan ini mungkin terlihat lemah dan diabaikan di satu lingkungan, sedangkan di tempat lain dapat sangat nyata dan kuat. Sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh pemerintahan yang ada, hubungan antara pendidikan dan kekuatan politik di negara-negara berkembang berbeda-beda antar komunitas (Duryat, 2021). Kekuasaan dalam arti sempit seringkali diartikan sebagai tujuan bukan alat (*tool*), sehingga kekuasaan bukan untuk mensejahterakan. Sebagai contoh, pengangkatan kepala sekolah dengan mengutamakan kedekatan dan uang serta mengesampingkan profesionalitas.

Hegemoni dan Dominasi Kekuasaan

Hegemoni dipahami sebagai jenis kekuasaan yang bersifat samar dan tidak tampak secara langsung, namun ditanamkan melalui persuasi, internalisasi ideologi, serta pembentukan kesadaran kolektif. Teori hegemoni dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Gramsci berpendapat bahwa kelompok penguasa mempertahankan dominasi melalui kontrol ideologi dan budaya. Antonio Gramsci berpendapat ideologi sebagai sesuatu yang berkembang sesuai kondisi sosial yang tidak hanya menyebar melalui kekerasan, namun berdasarkan konsensus Masyarakat (Afrohu Lubab & Suhartono, 2024). Hegemoni menghasilkan adanya ideologi dominan yang ditanamkan secara tidak langsung, sehingga dinormalisasikan dan tidak perlu dipertanyakan. Pendidikan berpotensi menjadi alat hegemoni, di mana ideologi dan nilai-nilai penguasa ditransmisikan ke dalam pikiran peserta didik (Kholik et al., 2025). Hal ini disampaikan melalui kurikulum, metode pembelajaran, dan struktur kelembagaan yang membawa kepentingan kelas dominan. Pendidikan sebagai alat hegemoni ideologi menjelaskan bahwa sistem pendidikan menjadi sarana untuk memperkuat atau menyebarkan ideologi dalam masyarakat.

Ideologi dominan bersumber dari kesepakatan antara penguasa dengan yang dikuasai, tidak semata-mata karena paksaan. Hegemoni dimaknai sebagai representasi dari dominasi dan kepemimpinan moral dan intelektual. Artinya, teori hegemoni menunjuk pada pengaruh pemimpin dalam membentuk sikap yang dipimpinnya (Rusliawati & Purnama Sari, 2023). Berbeda dengan konsep hegemoni, dominasi menjadi bentuk kekuasaan yang lebih terbuka, yaitu melalui aturan, sanksi, atau tekanan secara langsung untuk mengendalikan individu atau masyarakat. Dominasi menekankan kontrol struktural yang menyebabkan munculnya kontrol struktural dan resistensi karena hak individu dibatasi. Hegemoni dan dominasi merupakan dua aspek yang saling melengkapi, hegemoni bekerja pada ranah kesadaran, sedangkan dominasi melalui tindakan dan struktur yang tampak.

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

Teori hegemoni dan dominasi kekuasaan melahirkan dua pandangan penting dalam memahami bagaimana kekuasaan berjalan di masyarakat. Meski saling berkaitan, namun keduanya memiliki perbedaan dalam cara penerapan kekuasaan. Hegemoni menggambarkan kekuasaan yang dijalankan secara tidak langsung dan bukan melalui paksaan. Kelompok dominan berhasil menanamkan nilai, norma, dan perspektif yang dianggap kebenaran normal oleh masyarakat, termasuk sekalipun masyarakat tersebut sebenarnya sedang dirugikan. Konsep hegemoni dalam pendidikan diterapkan melalui kurikulum nasional yang seringkali menampilkan sejarah, moralitas, serta identitas yang mendukung kelompok kekuasaan tertentu dan mengabaikan kelompok minoritas. Struktur kekuasaan dalam pendidikan ditandai dengan adanya pemangku kebijakan atau seringkali disebut dengan *stake holder*. Pemangku kebijakan menentukan arah dunia pendidikan yang sejalan dengan kehendaknya melalui penanaman ideologi dalam aturan formal pendidikan (Sukma et al., 2024).

Sementara itu, dominasi kekuasaan lebih mengacu pada tindakan yang bersifat langsung, represif, dan seringkali memaksa melalui kontrol aturan atau sanksi. Hal tersebut terlihat dari struktur otorisasi lembaga pendidikan, mekanisme pendisiplinan, serta sistem penilaian yang ketat. Kekuasaan politik dalam arti sempit menganggap bahwa di dalam politik terdapat persaingan antarkelompok tertentu untuk memperebutkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara (Purwanto, 2022). Namun, makna politik tidak selalu mengenai perebutan kekuasaan. Contohnya adalah penerapan kebijakan pemerintah dan budaya sekolah yang ditentukan untuk mengatur ketertiban dan kedisiplinan siswa. Menurut Michel Foucault, kekuasaan tidak selalu berupa kekerasan fisik, namun juga bekerja secara halus melalui pengendalian, normalisasi, dan membentuk individu yang patuh. Hal ini terlihat dengan adanya pengaturan waktu belajar, disiplin kelas, pengontrolan perilaku siswa, serta sistem *reward and punishment* yang membentuk pola pikir dan tindakan siswa agar selalu sesuai dengan norma yang berlaku.

Hubungan kekuasaan dan pendidikan erat kaitannya dengan ideologi (Tilaar, 2003). Ideologi ditanamkan bukan melalui struktur, namun ke dalam kurikulum melalui proses hegemoni. Secara sederhana, hegemoni lebih memberikan penekanan pada proses penerimaan ideologis dan budaya yang membuat kekuasaan tampak alami, sedangkan dominasi kekuasaan lebih menekankan pada penerapan kekuasaan yang bersifat memaksa serta membatasi kehendak individu. Namun realitanya, kedua bentuk kekuasaan ini saling bekerjasama dan mempengaruhi satu sama lain. Dominasi kekuasaan membentuk struktur dan kontrol sosial, sedangkan hegemoni menanamkan penerimaan terhadap struktur tersebut secara tidak langsung. Memaknai hegemoni dan dominasi kekuasaan sangat diperlukan untuk membangun nalar kritis terhadap sistem pendidikan yang tidak adil. Hal tersebut mendorong kesadaran bahwa pendidikan bukan hanya tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana atau alat memperkuat kekuasaan dan struktur sosial.

Pendidikan Pembebasan

Pendidikan pembebasan merupakan alternatif solusi yang mengentaskan penindasan, yaitu melalui konsep pedagogis yang memberi kekuatan pendidikan kebebasan. Kebebasan yang diperjuangkan adalah hak setiap individu untuk mengembangkan kemampuannya sendiri, bukan kebebasan yang tidak memiliki dasar nilai-nilai moral (Hasanudin, 2021). Peserta didik dijadikan sebagai objek aktif yang memiliki kemampuan berpikir kritis, mempertanyakan keadaan sekitar, serta memahami dunia. Pendidikan pembebasan dilatarbelakangi oleh pemikiran pedagogi kritis. Konsep ini menekankan hal-hal penting dalam pendidikan, seperti cara kerja sistem pendidikan di dalam masyarakat serta praktik-praktik kekuasaan dan penindasan yang ada dalam dunia pendidikan. Pedagogi kritis adalah sebuah pemikiran kritis pendidikan atau disebut juga filsafat pendidikan sebagai sebuah gerakan sosial untuk meneliti pendidikan. Gerakan ini mengupayakan terwujudnya keadilan masyarakat dan menghilangkan kekuasaan dominan yang mengendalikan akses politik (Ura & Sudirgo, 2022).

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

Menurut perspektif pedagogi kritis, peran pendidikan adalah untuk merenungkan dan menilai secara kritis sistem serta ideologi yang mendominasi di masyarakat, sambil juga melawan sistem itu untuk mewujudkan perubahan sosial menuju pendidikan yang lebih baik (Fakih et al., 2024). Tujuan pendidikan pembebasan adalah terciptanya nalar kritis yang memungkinkan peserta didik menyadari struktur penindasan dan turut berkontribusi dalam rekonstruksi sosial yang lebih adil dan humanistik. Mekanisme yang digunakan harus melalui dua tahap yaitu pendidikan hadap masalah dan dialogis (Susrajat & Hambali, 2021). Artinya, praktik pendidikan memberikan siswa sebuah contoh masalah yang mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari dan dilakukan dialog aktif yang melibatkan siswa untuk mengungkapkan perspektif dan solusi yang mereka tawarkan. Pendidikan pembebasan mengupayakan terciptanya iklim pendidikan humanistik yang memanusiakan manusia. Pendekatan menggunakan proses *liberating* yaitu guru memberi kebebasan dari belenggu irrasionalitas tradisi dan ideologi (Ikmal, 2021).

Pendidikan pembebasan merupakan salah satu pendekatan belajar yang memposisikan peserta didik sebagai figur utama di kelas serta yang berperan penting untuk masyarakat. Gagasan tersebut erat kaitannya dengan Paulo Freire, seorang pakar pendidikan Brasil melalui karya terkenalnya *Pedagogy of the Oppressed* yang terbit pada tahun 1970. Freire berpendapat selain menjadi tempat belajar, pendidikan dijadikan sebagai ajang pertarungan gagasan yang membentuk kesadaran bersama masyarakat (Fikri et al., 2024). Pendidikan pembebasan menjadi gagasan modernitas yang menentang pendidikan tradisional. Ia menyebut model pendidikan tradisional sebagai "Gaya Bank" yang mana siswa diibaratkan wadah kosong yang hanya bisa diisi dengan ilmu oleh guru. Siswa tidak diberi ruang untuk berpikir dan belajar hanya mengulang informasi serta materi tanpa memikirkan kaitannya dengan keadaan sosial. Model ini tidak hanya menciptakan sikap pasif, namun juga memperkuat kekuasaan yang menekan. Siswa tidak dilibatkan dalam proses analisis serta perlawanan terhadap ketidakadilan di lingkungan mereka.

Gagasan pedagogi kritis sebenarnya berasal dari semangat perubahan yang dimiliki oleh Paulo Freire. Sebagai seorang pendidik, Freire tidak puas dengan situasi pendidikan yang terjadi. Ketika menemui persoalan di sekitarnya, Ia tidak memilih diam dan mengamati saja. Freire mengemukakan metode pembelajaran baru yang dapat mengubah struktur sosial di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa, kata "pedagogi" merujuk pada gaya pendidikan dialogis, sedangkan "kritis" berasal dari sikap gigih Freire dalam menumbangkan *status quo* (Fitramadhana, 2022). Salah satu tokoh pendidikan Islam yang mendukung Freire adalah Hasan Hanafi. Gagasan dari Hassan Hanafi memberikan tinjauan yang mendalam, khususnya tentang betapa pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk mengubah masyarakat dan membebaskan diri dari ideologi asing yang bertentangan dengan ajaran Islam (Marzuki et al., 2025). Hanafi menganjurkan agar kita berdiskusi secara mendalam, menafsirkan ulang tradisi, serta berpikir secara bebas, yang dianggap sangat krusial menurut kajian dalam dunia pendidikan Islam saat ini. Pendekatan ini sangat membantu dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada siswa dan membentuk jati diri yang mandiri, sehingga tidak terpengaruh oleh ideologi dari luar yang berpotensi merusak nilai-nilai moral Islam.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan dalam pendidikan memiliki fungsi ganda yaitu sebagai dominasi dan pembebasan. Melalui kajian literatur mengenai pemikiran kritis para filsuf dan teoritikus seperti Michel Foucault, Pierre Bourdieu, serta Paulo Freire, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dan pendidikan tidak hanya muncul melalui paksaan atau penindasan, namun apabila digunakan dengan semestinya, kekuasaan dapat memunculkan pemikiran kritis yang membentuk adanya pendidikan pembebasan. Pendidikan dapat berperan sebagai alat penindasan ketika berfungsi untuk mereproduksi ketidakadilan sosial dan mempertahankan struktur kekuasaan yang sudah ada melalui proses normalisasi cara berpikir

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

peserta didik. Sebaliknya, pendidikan juga berpotensi sebagai alat pembebasan dan membentuk nalar kritis yang memberdayakan peserta didik sebagai individu yang aktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap salah satu sisi ini bergantung pada posisi ideologis institusi pendidikan, metode pengajaran yang diterapkan, serta konteks sosial-politik di mana institusi tersebut beroperasi. Penindasan terjadi secara tidak terlihat dalam bentuk pengawasan, pendisiplinan, dan standarisasi yang justru merusak kebebasan berpikir siswa dan pengajar. Meskipun begitu, praktik pendidikan yang bersifat emansipasi atau membebaskan tetap bisa diwujudkan melalui pembelajaran yang dialogis, reflektif, dan berdasarkan pengalaman hidup yang menjadikan siswa sebagai pelaku perubahan sosial.

Setelah menelaah temuan penelitian ini, tergambar jelas bahwa dunia pendidikan erat kaitannya dengan dinamika kekuasaan dan ideologi yang mempengaruhinya. Seringkali, lembaga pendidikan tanpa sadar berperan dalam melanggengkan ketidakadilan sosial, menyajikan cerita tertentu dalam pendidikan sejarah sebagai "kebenaran mutlak" dengan mengabaikan pandangan lain yang dianggap mengancam status quo. Situasi ini memperjelas bahwa sekolah bukan sekadar tempat menimba ilmu, melainkan juga arena ideologis di mana pikiran dan tingkah laku dikendalikan secara terstruktur. Hasil kajian ini menggarisbawahi betapa pentingnya pendidikan kritis untuk menyadarkan guru dan murid tentang konstruksi yang membentuk hidup mereka. Pembelajaran yang hanya menekankan pada ketaatan dan hafalan justru menciptakan individu yang kurang terlatih untuk berpikir kritis dan tidak mampu menantang ketidakadilan di sekelilingnya.

Analisis mendalam terhadap temuan riset ini menghasilkan pemahaman bahwa dunia pendidikan bukan sekadar objek yang dipengaruhi oleh dominasi kekuasaan, namun juga secara aktif berperan dalam membentuk kekuasaan itu sendiri. Lembaga pendidikan, melalui proses penyerapan nilai, norma, serta praktik-praktik khusus, memainkan peran penting dalam membangun kerangka sosial dan politik di tengah masyarakat. Menurut pandangan Foucault, kekuasaan dalam dunia pendidikan bekerja melalui mekanisme pengawasan dan pendisiplinan yang menciptakan individu yang taat dan produktif. Sementara itu, dalam kerangka pemikiran Bordieu, modal sosial dan ekonomi mempengaruhi dominasi kekuasaan kelas-kelas atas. Hal ini semakin menciptakan adanya kesenjangan sosial dalam pendidikan. Sebaliknya, Freire menekankan betapa pentingnya kesadaran kritis sebagai jalan keluar untuk menghentikan siklus reproduksi struktur penindasan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki dua sisi mata uang, dapat menjadi alat untuk memperkuat ketidakadilan, atau justru menjadi kendaraan untuk mewujudkan perubahan sosial. Pemahaman ini membuka mata kita bahwa peran guru, murid, kurikulum, dan lingkungan belajar bukanlah sesuatu yang netral, melainkan terlibat dalam pergulatan ideologis yang menentukan ke mana arah perkembangan masyarakat akan dibawa. Dengan begitu, perubahan dalam dunia pendidikan tidak bisa hanya sebatas perubahan administratif atau prosedural, melainkan harus menyentuh akar dari struktur kekuasaan yang memengaruhi bagaimana pendidikan dipahami dan dijalankan.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu, kajian ini menyoroti pendekatan yang lebih mendalam untuk menggali kaitan antara pendidikan dan kekuasaan. Riset kritis yang berlandaskan teori Foucault, Freire, dan Freire memang mulai tumbuh, namun jumlahnya masih terbatas. Dalam studi ini, pendidikan dipandang bukan sekadar sarana pengajaran, melainkan arena reproduksi sosial, pembentukan jati diri, bahkan ajang pertarungan kelas. Kajian ini pun memperluas pandangan bahwa dominasi dalam pendidikan tak selalu kasat mata, melainkan terselubung dan kerap diterima begitu saja oleh murid maupun pengajar. Pendekatan yang dipakai memberi perspektif baru mengenai peran pendidikan dalam masyarakat, tidak seperti penelitian sebelumnya yang lebih menekankan positivisme serta kurang memperhatikan dimensi kekuasaan yang bersifat simbolik. Lebih lanjut, kajian ini menyatukan tinjauan historis dengan pemahaman modern tentang sistem pendidikan, agar tetap relevan dari segi teori maupun praktik dalam pusaran perubahan sosial yang tengah berlangsung kini.

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

Konsekuensi dari kebijakan yang lahir dari penemuan ini sangatlah krusial, khususnya dalam menyusun strategi pendidikan yang tak semata-mata berpusat pada hasil belajar, tetapi juga pada pemberdayaan siswa menjadi pribadi yang analitis dan kritis. Strategi pendidikan hendaknya dirancang dengan mencermati sisi kekuatan yang bekerja lewat kurikulum, metode pengajaran, dan mekanisme evaluasi. Pemerintah dan semua *stake holder* di dunia pendidikan perlu melakukan tinjauan ulang standar pendidikan nasional yang cenderung mengutamakan ranah kognitif dan kompetisi, serta memberi ruang bagi pedagogi kritis yang menekankan dialog, perenungan sosial, dan kesetaraan. Jika kebijakan tetap mengesampingkan dimensi ideologis pendidikan, maka sistem pendidikan akan terus menjadi instrumen yang memperkokoh kekuasaan dan menghilangkan peluang emansipasi dalam proses pembelajaran. Karenanya, sangat dibutuhkan kesungguhan dalam kebijakan untuk memasukkan pendekatan pendidikan yang membebaskan ke dalam sistem pendidikan formal, termasuk dalam penyusunan kurikulum, cara penilaian, serta peningkatan kapasitas profesional bagi guru.

Penelitian ini memberikan sudut pandang baru mengenai bagaimana pendidikan dan kekuasaan saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Pendidikan tidak sekadar transfer ilmu, melainkan sebuah sistem sosial yang membentuk pengetahuan, nilai, identitas, dan kekuasaan. Hal ini menekankan perlunya kajian teoritis yang lebih kritis terhadap kebijakan dan praktik pendidikan, melihatnya sebagai arena politik, bukan sekadar persoalan teknis. Cara pandang ini menantang metode pengajaran konvensional yang dianggap netral, dan mendorong perubahan dalam memandang guru, murid, kurikulum, evaluasi, serta lingkungan belajar. Pendidikan pembebasan menawarkan cara pandang alternatif terhadap dominasi ideologi dalam pendidikan, dengan mengutamakan dialog, refleksi, dan kesadaran dalam proses belajar. Sementara itu, pendekatan Foucaultian menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya menindas, tetapi juga berperan dalam membentuk individu. Oleh karena itu, definisi pendidikan perlu diperluas agar mencakup aspek-aspek diskursif, historis, dan struktural yang melekat padanya. Ini membuka peluang untuk memperbarui teori pendidikan modern dengan memasukkan analisis ideologi, wacana, dan struktur kekuasaan sebagai elemen penting dalam dunia pendidikan.

KESIMPULAN

Kekuasaan tidak hanya hadir di sistem yang dikuasai oleh satu pihak saja, tetapi juga tersembunyi dalam praktik pendidikan modern yang dianggap demokratis. Hal yang paling disoroti adalah lembaga pendidikan, melalui materi pelajaran, cara penilaian, dan aturan mengajar yang terlihat baik, dijadikan alat untuk melanggengkan kesenjangan sosial. Guru, murid, dan pemangku kebijakan tanpa sadar terlibat dalam proses yang menyamakan cara berpikir, menghambat kreativitas, dan menguatkan tatanan sosial yang sudah ada. Sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga ruang di mana kekuasaan bekerja secara halus melalui pengawasan, kedisiplinan, dan kontrol ideologi yang tidak terlihat jelas.

Teori dari Foucault, Bourdieu, dan Freire mampu menjawab pertanyaan utama dalam riset ini tentang bagaimana kekuasaan berperan dalam pendidikan dan bagaimana cara menciptakan ruang pembebasan. Konsep disiplin dari Foucault menggambarkan kekuasaan sebagai proses pembentukan individu dan pedagogi kritis dari Freire membuka kesempatan untuk kemerdekaan melalui pendidikan yang interaktif dan transformatif. Meskipun demikian, penelitian ini menyadari adanya keterbatasan karena hanya berdasarkan studi literatur, tanpa data yang diambil secara langsung dari praktik pendidikan di lapangan. Selain itu, penerapan ide-ide pembebasan ini dalam sistem pendidikan yang sangat terstandarisasi masih merupakan tantangan besar yang perlu dijawab oleh riset selanjutnya.

Diperlukan cara pandang yang lebih memperhatikan konteks dan melibatkan berbagai bidang ilmu. Penelitian selanjutnya harus mempertimbangkan keadaan pendidikan Indonesia, termasuk pengaruh dari sejarah penjajahan, birokrasi, serta keberagaman budaya dan nilai-nilai pendidikan tradisional. Penting juga untuk meneliti bagaimana teknologi dan digitalisasi

<https://jiipipi.org/index.php/jiipipi>

memengaruhi hubungan kekuasaan dalam pendidikan, serta memperhatikan aspek psikologis dan seperti faktor gender, kelas sosial, dan disabilitas. Kesimpulan pentingnya adalah pendidikan merupakan arena politik yang sangat memengaruhi masa depan masyarakat, dan hanya dengan pendekatan yang kritis dan membebaskan, pendidikan dapat benar-benar menjadi alat pembebasan, bukan hanya melanggengkan ketidakadilan.

REFERENSI

- Afrohul Lubab, M., & Suhartono. (2024). Hegemoni Akademis: Analisis Sosiologi Sastra dalam Novel Panakluk Badai Karya Aguk Irawan MN. *BAPALA*, 11(3), 487–493. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/65194>
- Agus Siswadi, G. (2024a). *Filsafat Manusia: Memahami Manusia sebagai Homo Complexus*. PT Mafy Media Literasi Indonesia. https://www.researchgate.net/profile/Gede-Agus-Siswadi/publication/377951590_FILSAFAT_MANUSIA_MEMAHAMI_MANUSIA_SEBAGAI_HOMO_COMPLEXUS/links/65be61a81e1ec12eff71a414/FILSAFAT-MANUSIA-MEMAHAMI-MANUSIA-SEBAGAI-HOMO-COMPLEXUS.pdf#page=201
- Agus Siswadi, G. (2024b). Reproduksi Kekuasaan Melalui Kekerasan Simbolik dalam Sistem Pendidikan: Analisis Kritis Pemikiran Pierre Bourdieu. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, 29(1), 21–31. <http://ejournal.sthdjateng.ac.id/index.php/WidyaAksara/article/download/255/166>
- Al Ayyubi, I. I., Hayati, A. F., Azizah, E. N., Herdiansyah, R., & Mirayanti, U. (2024). Pendidikan Humanis Paulo Freire dalam Pembelajaran Matematika MI. *Wulang: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 01(1), 1–15. <http://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/wjp/article/view/178%0Ahttp://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/wjp/article/download/178/92>
- Allolayuk, A. (2021). Menyingkap Sisi Gelap Pendidikan sebagai Arena Reproduksi Kesenjangan Sosial Berdasarkan Perspektif Pierre Bourdieu. *Syntax Idea*, 8(8), 1802–1813. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/58871>
- Almas, A. F. (2024). Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Kritik dan Dialog antara Ideologis dengan Praksis Pendidikan. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(2), 383–394. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/njpi.2024.v4i2-4>
- Backer, D. I. (2022). *Althusser dan Education*. Bloomsbury Publisher. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Damanhuri, Shodikin, Yacub, J., Permatasari, E., & Kholijah, S. (2024). Keterkaitan antara Politik Pendidikan, Kebijakan Pendidikan dan Kekuasaan, serta Implikasinya pada Praktek Pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam. *JPPG: Jurnal Pengembangan Profesi Guru*, 2, 1–14. <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/jppg/article/view/648>
- Devi, I., Hanani, S., Syafitri, A., & Indri Yani Harahap, N. (2023). Birokrasi dan Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern: dengan Pendekatan Max Weber. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 268–281. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Concept/article/view/790>
- Duryat, M. (2021). *Kepemimpinan Pendidikan: Meneguhkan Legitimasi dalam Berkontestasi di Bidang Pendidikan*. Penerbit Alfabeta. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=DyQ3EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kepemimpinan+pendidikan+meneguhkan+legitimasi+dalam+berkontestasi+di+bidang+pendidikan&ots=v s4abFxm4g&sig=ow3urnlB5Nu6bhdjd8E_GUz_nRc&redir_esc=y#v=onepage&q=kepemimpinan pendidikan meneguhkan legitimasi dalam berkontestasi di bidang pendidikan&f=false
- Faisal, M. (2021). Permainan Kekuasaan Simbolik Dalam Pendidikan. *Fastabiqulkhairaat*, 2(1), 21–36. <https://jurnalfastabiqulkhairaat.faiunisapalu.ac.id/index.php/jfk/article/view/4>
- Fakih, M., Topatimasang, R., & Raharjo, T. (2024). *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis: Vol. IV*. INSISTPress. <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=V3vIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pendidikan+populer+membangun+kesadaran+kritis&ots=kB3p7lbp7B&sig=94Qq3XWvsSXNrosAVcpPf>

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

mrD6RI&redir_esc=y#v=onepage&q=pendidikan%20populer%20membangun%20kesadaran%20kr
itis&f=false

- Fikri, A., Sukardi, I., Astuti, M., Ikbali, M., & Anggaini, A. (2024). Falsafah Kritis dan Marxisme dan Teori Pendidikan Kritis Paulo Freire dan Henry Giroux. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 2810–2817. <https://irje.org/index.php/irje>
- Fitramadhana, R. (2022). Pemikiran Pedagogi Kritis Henry Giroux. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 9(1), 84–120. <https://doi.org/10.22146/jps.v9i1.72188>
- Florentino, M. (2024). Pengaruh Politik Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Terutama dalam Pendidikan Dasar. *Journal Nagalalang Primary Education*, 4(1), 1–23. <https://nagalalang.nusanipa.ac.id/index.php/nagalalang/article/view/84>
- Harjono. (2024). Ideologi Pendidikan dan Sindrom Politik Etis. *Magistra*, 24(100), 11–19.
- Hengki, Y., Ndoluanak, Tjalla Awaluddin, & Sarifah Iva. (2023). Pengaruh Politik Arah Perkembangan Suatu Bangsa (Kekuasaan) Terhadap Konstruksi Pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 2467–2471. https://scholar.google.com/scholar?cites=17030919443362827416&as_sdt=2005&sciodt=2007&hl=en
- Hizam, I., & Baharudin. (2022). Peran Kekuasaan Dalam Pendidikan. *Society*, 13(1), 47–52. <https://doi.org/10.20414/society.v13i1.5275>
- Humaira, F., Rouf, A. D., Kamal, M., & Januar. (2024). Mengurai Jaringan Politik dalam Pendidikan (Kontribusi Kekuasaan dalam Membentuk Masa Depan Generasi Alpha). *Jurnal Lingkak Pembelajaran Inovatif*, 5(11), 105–117. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jlpi/article/view/5745>
- Ikmal, H. (2021). *Nalar Humanisme dalam Pendidikan: Belajar dari Ki Hadjar Dewantara dan Paulo Freire*. Nawa Litera Publishing. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CydHEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA113&dq=nalar+humanisme+dalam+pendidikan+belajar+dari+ki+hadjar+dewantara+dan+paulo+freire&ots=kT36b5AvNH&sig=gfJspTeqVNZZDqIqt-jsurks3hg&redir_esc=y#v=onepage&q=nalar+humanisme+dalam+pendidikan+belajar+dari+ki+hadjar+dewantara+dan+paulo+freire&f=false
- Ilham, I., Anshari, A., & Johar Amir. (2023). Representasi Kekuasaan dalam Pidato Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 9(2), 1423–1436. <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i2.2363>
- Kholik, M., Nikmah, S., Wilda, S., Adawiyah, R., Rangkuti, K., Rahmi, L., Hasibuan, & Lubis, S. A. (2025). *Politik Pendidikan Islam*. AE Publisher. https://books.google.co.id/books?id=hChAEQAAQBAJ&source=gbs_navlinks_s
- Lestari, A., Munajah, N., & Uyuni, B. (2023). Konsep Pendidikan Paulo Freire Dalam Perspektif Islam. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 288–307. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v6i2.3319>
- Marzuki, T., Hulawa, D. E., & Alwizar. (2025). Komparasi Pemikiran Ibnu Khaldun dan Hassan Hanafi terhadap Konsep Lingkungan Pendidikan. *Ainara Journal*, 6(1), 146–155. <https://journal.ainarapress.org/index.php/ainj/article/view/796>
- Mizal, B. (2021). Pendidikan Pembebasan (Memahami Pemikiran Paulo Friere dari Perspektif Islam). *Intelektualita: Journal of Educatoin Sciences and Teacher Training*, 1(7), 1–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ji.v7i01.9918>
- Musfah, J. (2022). *Kepemimpinan Pendidikan: Teori dan Kebijakan*. KENCANA. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=eVS6EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kepemi+mpinan+pendidikan+teori+dan+kebijakan&ots=8cmA7gxSLF&sig=CL-pVE9W2_-xSvcnh8QGa6N6xfU&redir_esc=y#v=onepage&q=kepemimpinan+pendidikan+teori+dan+kebijakan&f=false
- Pratama, R. A. (2021). Kekuasaan, Pengetahuan, dan Hegemoni Bahasa dalam Perspektif Michel Foucault dan Francis Bacon. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 33–43. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.30543>
- Purwanto, N. A. (2022). Pengaruh Politik dalam Bidang Pendidikan di Indonesia. *Kompasiana*, 02, 1–11. <https://www.kompasiana.com/fivie44956/62921a3053e2c36c0c35f742/pengaruh-pulitik-dalam-bidang-pendidikan-di-indonesia>
- Rofiq, S. M., & Muhammad, S. N. (2023). Teori Pemikiran Pendidikan Islam Muhammad Iqbal. *Thinker Islamic*. https://www.academia.edu/126861530/Jurnal_pemikiran_pendidikan_islam_new
- Rosyidah, I., & Ridlwan, M. (2022). Konsep Pendidikan Humanistik Perspektif Ki Hajar Dewantara dan

<https://jipipi.org/index.php/jipipi>

- Paulo Freire dalam Kritik Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1).
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3917%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/download/3917/2734>
- Rusliawati, E., & Purnama Sari, I. (2023). Hegemoni dan Perlawanan: Interpretasi Gramscian terhadap Novel di Kaki Bukit Cibalak. *Mantra: Jurnal Sastra Indonesia*, 1(2), 60–68.
<https://doi.org/10.36761/mantra.v1i2.3502>
- Sarnoto, A. Z. (2022). Konsepsi politik pendidikan di Indonesia. *EDUCHILD*, 01(1), 30–31.
<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/540/>
- Siswadi, G. A. (2024). Relasi Kuasa terhadap Konstruksi Pengetahuan di Sekolah Perspektif Michel Foucault dan Refleksi atas Sistem Pendidikan di Indonesia. *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru*, 8(1), 1–15. <http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/SA/article/view/3405>
- Sukma, G., Pendidikan, P., Islam, A., Gunung, S., Bandung, D., & Priatna, T. (2024). Hegemoni Kekuasaan Penguasa terhadap Pendidikan Bermoral dalam Tataran Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis. *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat*, 2(3), 123–131.
<https://doi.org/10.55606/sinarkasih.v2i3.362>
- Susrajat, A., & Hambali, R. Y. A. (2021). Analisis Filsafat Paulo Freire Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 5(1), 14–32. <https://doi.org/10.15575/jp.v5i1.107>
- Tilaar, H. A. . (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan*. Penerbit Indonesia Tera.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=QXAH73XZDUgC&oi=fnd&pg=PR9&dq=pendidikan+dan+kekuasaan&ots=M8bKIT7GsE&sig=GTU2rDTyp7EipjXML9evqTUKC0E&redir_esc=y#v=onepage&q=pendidikan+dan+kekuasaan&f=true
- Tusadia, A., Khoiri², Q., Islam, U., Fatmawati, N., Bengkulu, S., Dewa, P., Selebar, K., Bengkulu, K., & Annisatusadia, B. (2023). Relasi Pendidikan Islam, Politik dan Kekuasaan. *Journal on Education*, 05(02), 4796–4804. <https://core.ac.uk/download/pdf/553283119.pdf>
- Ura, U., & Sudirgo, T. (2022). Kritik Pedagogi Kritis terhadap Politik dan Praktik Pendidikan dalam Pemikiran Ivan Illich dan Henry Giroux. *Prosiding Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanegara*, 63–65.
https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10090005_7A190822071807.pdf
- Wibowo, A. S., Weda Wigena, I. B., & Wahyuni, K. A. (2025). *Sosiologi Politik*. Tahta Media Group.
<https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1261>
- Wilda, S. (2024). Analisis Kebijakan dan Kekuasaan dan Implementasinya terhadap Pendidikan di Indonesia. *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 1(3), 162–176.
<https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/AhsaniTaqwim/article/view/87>